

PERAN OPEN DATA DALAM MEWUJUDKAN *OPEN GOVERNANCE*: STUDI OPTIMALISASI DI SEKTOR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA

THE ROLE OF OPEN DATA IN ACHIEVING OPEN GOVERNANCE: AN OPTIMIZATION STUDY IN THE REGIONAL GOVERNMENT SECTOR OF ACEH JAYA REGENCY

Munawarul Fattah¹, Desita Ria Yusian TB², M. Bayu Wibawa³

^{1,2,3}Jurusan Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Ubudiyah Indonesia, Banda Aceh

E-mail : ¹munawarul@uui.ac.id, ²desita@uui.ac.id, ³mbayuw@uui.ac.id

Abstrak - *Open data* merupakan salah satu instrumen utama dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, yang menjadi pilar utama dalam penerapan *open governance*. Kabupaten Aceh Jaya mempunyai portal *open data* sebagai bentuk keterbukaan pemerintah kepada masyarakat di bawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian (DISKOMINSA) Kabupaten Aceh Jaya. Studi ini mengeksplorasi bagaimana optimalisasi penggunaan *open data* dapat meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Aceh Jaya. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, jumlah sampel dalam penelitian ini 31 orang dengan durasi penelitian 2 bulan, dengan menggunakan instrumen kuesioner, penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan dan strategi dalam implementasi *open data* di lingkungan pemerintah daerah. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kebijakan terkait, observasi langsung terhadap *platform open data*, serta analisis dokumen kebijakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *open data* di Kabupaten Aceh Jaya telah mengalami perkembangan signifikan, namun masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya tenaga ahli dalam pengelolaan data serta keterbatasan dalam integrasi sistem data antar instansi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi, serta optimalisasi regulasi yang mendukung ekosistem *open data*. Studi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan keterbukaan informasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan responsif.

Kata Kunci: *Open Data, Open Governance, Pemerintahan Daerah, Transparansi, Partisipasi Publik, Aceh Jaya*

Abstract - *Open data* is one of the main instruments in supporting government transparency and accountability, which are key pillars in the implementation of *open governance*. Aceh Jaya Regency has an open data portal as a form of government transparency to the public, managed under the Department of Communication, Informatics, and Encryption (DISKOMINSA) of Aceh Jaya Regency. This study explores how optimizing the use of open data can enhance the effectiveness of local government governance in Aceh Jaya Regency. Using a qualitative-descriptive approach, the study involved a sample of 31 respondents over a two-month research period. Through the use of questionnaires, the study identifies various challenges and strategies in the implementation of open data within the local government environment. Data was collected through interviews with relevant policymakers, direct observations of the open data platform, and an analysis of applicable policy documents. The findings indicate that the implementation of open data in Aceh Jaya Regency has shown significant progress. However, several challenges remain, such as a lack of experts in data management and limitations in system integration between government agencies. To overcome these obstacles, strategies such as improving human resource capacity, strengthening technological infrastructure, and optimizing regulations that support the open data ecosystem are necessary. This study is expected to serve as a reference for other local governments in enhancing information transparency to achieve more effective and responsive governance.

Keywords: *Open Data, Open Governance, Local Government, Transparency, Public Participation, Aceh Jaya*

I. PENDAHULUAN

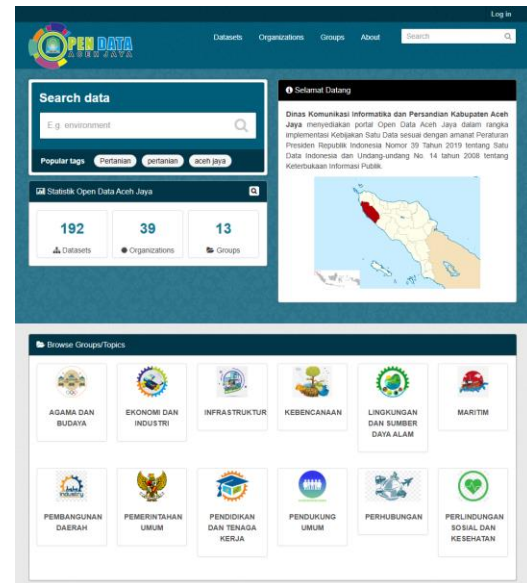
Penerapan prinsip transparansi dan partisipasi dalam pemerintahan menjadi elemen kunci dalam meningkatkan kualitas layanan publik (Janssen et al., 2012). *Open data* merupakan salah satu instrumen yang memungkinkan akses terbuka terhadap informasi pemerintah, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan (Ubaldi, 2013). Kabupaten Aceh Jaya sebagai salah satu daerah yang berkomitmen dalam implementasi *open government* telah mengadopsi kebijakan *open data* guna mendukung efektivitas pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

pada tahun 2011 Indonesia bersama dengan beberapa negara lainnya seperti Amerika Serikat, Brasil, Meksiko, Inggris, Norwegia, Afrika Selatan, dan Filipina memprakarsai terbentuknya inisiatif Open Government Partnership (OGP). Program ini merupakan sebuah inisiatif untuk pemerintah agar dapat berkomitmen dalam meningkatkan transparansi, mengembangkan komunitas, memerangi korupsi, dan menerapkan teknologi baru untuk menguatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Indrajit, 2018:250). Indonesia kemudian menindaklanjuti dengan meluncurkan gerakan Open Government Indonesia (OGI) pada Januari 2012 oleh Wakil Presiden Budiono pada waktu itu di Istana Presiden. (Hendrawan, 2019)

Dirangkum dari Agung Indrajit (2018: 249), open government dan open government data tidak dapat dipisahkan ketika kita ingin berbicara mengenai keterbukaan informasi kepada publik oleh pemerintah. Di Indonesia upaya untuk menerapkan konsep open government dimulai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan kemudian melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan adanya klausul dalam UU 14 2008 tentang KIP pada Bagian Keempat yaitu Kewajiban Badan Publik di Pasal 8, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Bagian Ketiga yaitu tentang Sistem Informasi pelayanan Publik di Pasal 23, terjadi sebuah perubahan dalam aksesibilitas data, sebelumnya data tertutup dan baru dibuka ke publik ketika diminta, sekarang data tersebut harus terbuka secara langsung tanpa harus adanya permintaan terlebih dahulu. Kemudian juga dalam UU KIP ini berbagai lembaga pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah didorong untuk menggunakan

teknologi digital dalam publikasi dari data-data terkait. (Indrajit, 2018:249)

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya saat ini sudah mempunyai portal resmi *Open Data* berbasis web yaitu *Open Data* Aceh Jaya yang dapat diakses pada link <https://data.acehjayakab.go.id/>.



Gambar 1. Tampilan Portal *Open Data* Aceh Jaya

Implementasi portal *open data* di Pemerintah Aceh baru dimulai pada tahun 2018 sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya baru menerapkannya pada tahun 2020 dibawah kendali langsung Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Kabupaten Aceh Jaya. Dengan adanya portal tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan data dan informasi publik dalam pembangunan Kabupaten Aceh Jaya yang lebih baik.

Namun, dalam praktiknya, penerapan *open data* di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan data, infrastruktur teknologi yang belum optimal, serta minimnya kolaborasi antar instansi dalam menyediakan data yang terintegrasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana optimalisasi open data dapat mendukung *open governance* di Kabupaten Aceh Jaya serta mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitasnya.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tempat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait, observasi terhadap platform *open data* yang digunakan oleh pemerintah daerah, serta analisis terhadap dokumen kebijakan yang mengatur implementasi *open data* di Kabupaten Aceh Jaya.

Adapun tempat penelitian dilakukan pada Kabupaten Aceh Jaya dengan jumlah partisipan sekitar 35 orang, dimana partisipan merupakan operator pelaksana *open data* di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan *open data* dalam mendukung *open governance*.

B. Teknik Pengumpulan dan Sumber Data

1. Kuesioner

Kuesioner disebar ke pengelola *portal open data* di setiap SKPK, yang mana pada Kabupaten Aceh Jaya memiliki 31 SKPK. Kuesioner ini merupakan suatu alat atau instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data dari responden melalui serangkaian pertanyaan tertulis.

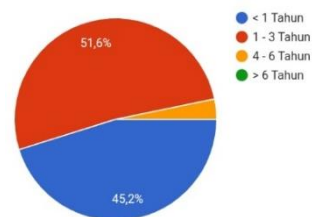
III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hasil survei Operator Open data

1. Profil Responden

Penelitian ini melibatkan 31 operator Open Data dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Kabupaten Aceh Jaya. Berdasarkan pengalaman kerja:

- 45,2% (14 responden) memiliki pengalaman kurang dari 1 tahun.
 - 51,6% (16 responden) memiliki pengalaman 1 hingga 3 tahun.
 - 3,2% (1 responden) memiliki pengalaman lebih dari 4 hingga 6 tahun.
- Mayoritas operator Open Data memiliki pengalaman menengah, meskipun ada juga yang baru mengenal sistem Open Data.



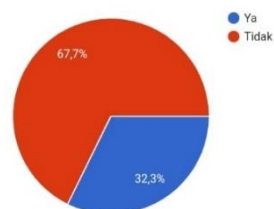
2. Tingkat Pemahaman dan Pelatihan Open Data

Sebanyak 32,3% (10 responden) mengaku pernah mengikuti pelatihan terkait Open Data, sementara 67,7% (21 responden) belum pernah mendapatkan pelatihan. Ini menunjukkan bahwa tidak semua operator memiliki pemahaman yang cukup tentang pengelolaan Open Data, yang dapat memengaruhi efektivitas pengelolaannya.



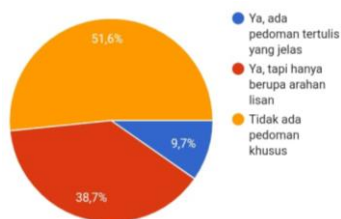
3. Pengelolaan dan Pembaruan Data di Portal Open Data

Sebagian besar SKPK (67,7% atau 21 responden) tidak memiliki jadwal tetap atau jarang memperbarui data di portal Open Data Kabupaten Aceh Jaya. Sebaliknya, 32,3% (10 responden) memiliki pedoman tertulis yang jelas terkait pengelolaan data tersebut.



4. Penggunaan Pedoman dalam Pengelolaan Open Data

Sebagian besar responden (51,6% atau 16 orang) mengatakan tidak ada pedoman khusus yang harus diikuti dalam mengelola Open Data. 38,7% (12 responden) menyebutkan bahwa ada pedoman, tetapi hanya berupa arahan lisan. Sementara itu, 9,7% (3 responden) menyatakan adanya pedoman tertulis yang jelas.

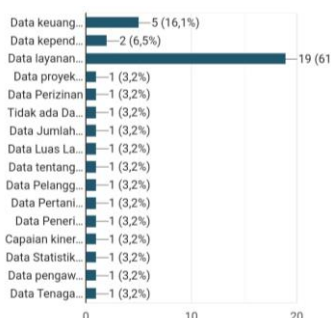


5. Jenis Data yang Paling Sering Dipublikasikan

Jenis data yang paling sering dipublikasikan oleh SKPK adalah:

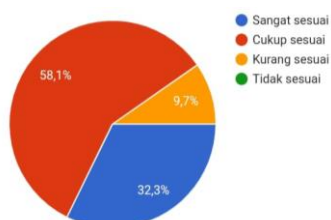
- 61,3 % (19 responden) mempublikasikan data layanan publik.
- 16,1% (5 responden) mempublikasikan data keuangan dan anggaran.
- 6,5% (2 responden) mempublikasikan data kependudukan.

Data terkait proyek pembangunan, perizinan, dan topik lainnya dipublikasikan dalam jumlah lebih sedikit.



6. Kesesuaian Data dengan Kebutuhan Masyarakat dan Pihak Berkepentingan

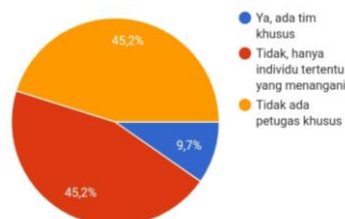
Sebanyak 58,1% (18 responden) merasa data yang disediakan cukup sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pihak berkepentingan. 32,3% (10 responden) merasa sangat sesuai, sementara 9,7% (3 responden) merasa tidak sesuai.



7. Tim yang Bertanggung Jawab dalam Pengelolaan Open Data

Sebanyak 45,2% (14 responden) mengatakan tidak ada petugas khusus yang menangani pengelolaan Open Data, sementara 45,2% (14 responden) mengatakan hanya individu tertentu yang bertanggung jawab. Hanya 9,7% (3

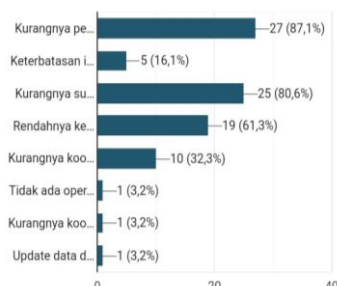
responden) yang mengatakan ada tim khusus yang mengelola Open Data.



8. Kendala dalam Implementasi Open Data

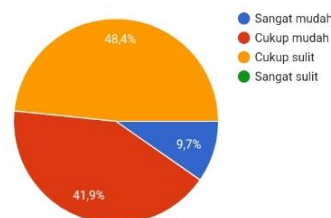
Beberapa kendala utama dalam penerapan Open Data meliputi:

- 87,1% menyebutkan kurangnya pemahaman tentang Open Data.
- 80,6% menyebutkan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten.
- 61,3% mengatakan rendahnya kesadaran akan manfaat Open Data.



9. Kesulitan dalam Mengunggah atau Memperbarui Data

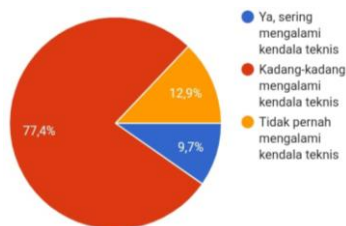
Sebanyak 48,4% (15 responden) menganggap cukup sulit untuk mengunggah atau memperbarui data di portal Open Data. 12,9% (4 responden) tidak pernah mengalami kendala teknis, sementara 9,7% (3 responden) sering menghadapi kendala teknis.



10. Kendala Teknis dalam Pengelolaan Open Data

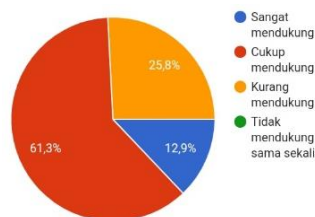
Sebanyak 77,4% (15 responden) mengatakan kadang-kadang mereka mengalami kendala teknis saat mengelola data. Sementara 41,9% (13 responden)

merasa pengelolaan data cukup mudah, dan 9,7% (3 responden) merasa sangat mudah.



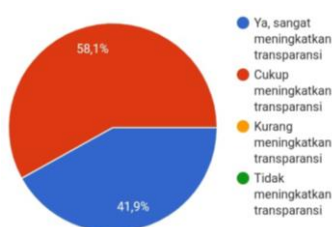
11. Dukungan Pimpinan dalam Implementasi Open Data

Sebanyak 61,3% (17 responden) mengatakan bahwa dukungan pimpinan cukup mendukung implementasi Open Data. Namun, 25,8% (8 responden) merasa dukungan pimpinan kurang mendukung, sementara 12,9% (4 responden) merasa sangat mendukung.



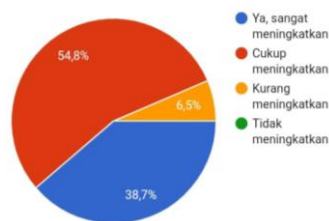
12. Pengaruh Open Data terhadap Transparansi Pemerintahan

Sebanyak 58,1% (18 responden) mengatakan bahwa Open Data cukup meningkatkan transparansi pemerintahan, sementara 41,9% (13 responden) menyatakan bahwa Open Data sangat meningkatkan transparansi.



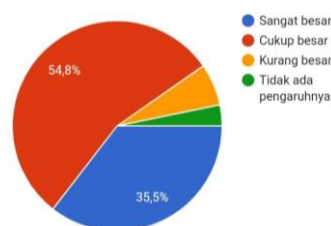
13. Pengaruh Open Data terhadap Akuntabilitas

Dalam hal akuntabilitas, 54,8% (17 responden) merasa bahwa Open Data cukup meningkatkan akuntabilitas SKPK kepada masyarakat, sedangkan 38,7% (12 responden) merasa sangat meningkatkan akuntabilitas, dan 6,5% (2 responden) merasa kurang meningkatkan.



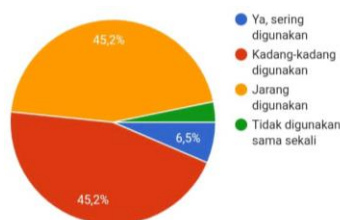
14. Peran Open Data dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik

Sebanyak 54,8% (17 responden) menilai bahwa peran Open Data cukup besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Sedangkan 35,5% (11 responden) merasa peran Open Data sangat besar, dan 6,5% (2 responden) merasa peran Open Data kurang besar.



15. Keaktifan Masyarakat dalam Menggunakan Data yang Dipublikasikan

Sebanyak 42,2% (14 responden) mengatakan bahwa masyarakat jarang menggunakan data yang dipublikasikan, sementara 45,2% (14 responden) mengatakan masyarakat kadang-kadang menggunakan data tersebut. 6,5% (2 responden) mengatakan masyarakat sering menggunakan data, dan 3,2% (1 responden) mengatakan tidak menggunakan sama sekali.

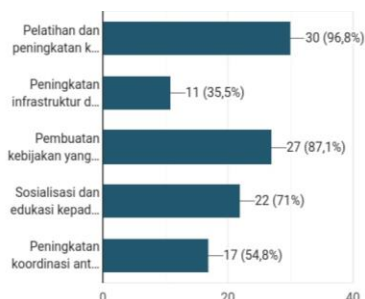


16. Cara Meningkatkan Kualitas dan Pemanfaatan Open Data

Untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan Open Data di Kabupaten Aceh Jaya, beberapa cara yang disarankan antara lain:

- 96,8% menganjurkan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi operator Open Data.

- 87,1% mendukung pembuatan kebijakan yang lebih tegas terkait Open Data.
- 71% menyarankan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat Open Data.



B. Pembahasan

1. Kondisi Penerapan Open Data di Kabupaten Aceh Jaya

Implementasi open data di Kabupaten Aceh Jaya telah mengalami perkembangan signifikan, terutama dalam penyediaan portal data yang memungkinkan akses terbuka terhadap informasi publik. Namun, masih terdapat beberapa hambatan, seperti keterbatasan fitur dalam portal, kurangnya tenaga ahli dalam pengelolaan data, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan data yang tersedia.

2. Tantangan dalam Optimalisasi Open Data

Beberapa tantangan utama dalam penerapan open data di tingkat daerah meliputi:

- Keterbatasan infrastruktur teknologi yang dapat menghambat keterjangkauan dan aksesibilitas data.
- Kurangnya standar kualitas data yang menyebabkan kesulitan dalam memastikan validitas dan reliabilitas informasi.
- Minimnya koordinasi antar instansi dalam berbagi dan mengelola data secara terpadu.

3. Strategi Optimalisasi Open Data

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, strategi berikut dapat diterapkan:

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Pelatihan bagi pegawai

pemerintah daerah dalam pengelolaan dan analisis data guna memastikan kualitas dan keakuratan informasi yang disediakan.

- Penguatan Infrastruktur Teknologi: Investasi dalam sistem pengelolaan data yang lebih canggih dan memastikan interoperabilitas dengan sistem lain untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas.
- Peningkatan Kolaborasi dengan Masyarakat dan Sektor Swasta: Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan data serta membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk inovasi berbasis data.
- Optimalisasi Regulasi dan Kebijakan: Penyusunan kebijakan yang lebih mendukung ekosistem *open data* serta penguatan regulasi terkait transparansi dan keterbukaan informasi.

4. Pembahasan Hasil survei Operator Open data

- Profil Responden:
Sebagian besar operator *Open Data* di Aceh Jaya memiliki pengalaman 1 hingga 3 tahun, meskipun ada juga yang baru terjun atau sudah berpengalaman lebih dari 3 tahun. Variasi ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam pengelolaan data.
- Pelatihan dan Pemahaman *Open Data*:
Lebih dari dua pertiga responden belum pernah mengikuti pelatihan terkait *Open Data*, yang menjadi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data. Pelatihan intensif diperlukan agar operator lebih kompeten dalam menangani data terbuka.
- Pengelolaan dan Pembaruan Data:
Banyak SKPK yang tidak memiliki jadwal tetap untuk memperbarui data di portal, yang bisa menyebabkan informasi menjadi usang dan tidak relevan. Perlu ada komitmen untuk memperbarui data secara rutin agar tetap akurat dan bermanfaat.
- Pedoman Pengelolaan Data:
Sebagian besar operator tidak memiliki pedoman tertulis yang jelas dalam mengelola *Open Data*. Hal ini menandakan perlunya pedoman standar yang dapat membantu memastikan

- konsistensi dalam pengelolaan data di seluruh SKPK.
- 5) Jenis Data yang Dipublikasikan:
Mayoritas SKPK lebih fokus pada data layanan publik, yang langsung berdampak pada masyarakat. Meskipun begitu, jenis data lain seperti data keuangan dan perizinan juga perlu lebih sering dipublikasikan untuk meningkatkan transparansi.
 - 6) Kesesuaian Data dengan Kebutuhan Masyarakat:
Sebagian besar merasa data yang dipublikasikan cukup sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, masih ada potensi untuk meningkatkan kesesuaian data dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan dan pemanfaatan data.
 - 7) Tim Pengelola *Open Data*:
Sebagian besar responden tidak memiliki tim khusus yang menangani *Open Data*, dan sebagian besar hanya mengandalkan individu tertentu. Pembentukan tim khusus akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan data.
 - 8) Kendala dalam Implementasi *Open Data*:
Kurangnya pemahaman tentang *Open Data*, keterbatasan sumber daya manusia, dan rendahnya kesadaran akan manfaat *Open Data* adalah hambatan utama. Untuk mengatasi ini, perlu adanya peningkatan kapasitas dan edukasi kepada semua pihak terkait.
 - 9) Kesulitan dalam Mengunggah atau Memperbarui Data:
Setengah dari operator merasa kesulitan dalam mengunggah atau memperbarui data. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur teknis dan pelatihan teknis bagi operator perlu diperkuat agar pengelolaan data bisa berjalan lebih lancar.
 - 10) Kendala Teknis dalam Pengelolaan Data:
Banyak responden yang mengalami kendala teknis dalam mengelola *Open Data*. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan infrastruktur IT yang lebih kuat dan dukungan teknis yang memadai.
 - 11) Dukungan Pimpinan dalam *Open Data*:
Sebagian besar responden merasa dukungan pimpinan sudah cukup, meskipun ada yang merasa kurang. Dukungan aktif dari pimpinan sangat penting untuk mendorong keberhasilan implementasi *Open Data* di SKPK.
 - 12) Pengaruh *Open Data* terhadap Transparansi Pemerintahan:
Mayoritas responden menganggap *Open Data* telah cukup meningkatkan transparansi pemerintahan. Meskipun demikian, pengelolaan data yang lebih lengkap dan mudah diakses akan lebih mendukung transparansi ini.
 - 13) Pengaruh *Open Data* terhadap Akuntabilitas:
Sebagian besar responden merasa *Open Data* telah meningkatkan akuntabilitas SKPK kepada masyarakat. Namun, untuk memperkuat akuntabilitas, pengelolaan data yang lebih terbuka dan mudah dipahami perlu ditingkatkan.
 - 14) Peran *Open Data* dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat:
Open Data dianggap memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Sosialisasi yang lebih intensif akan lebih meningkatkan pemanfaatan data untuk partisipasi publik.
 - 15) Keaktifan Masyarakat dalam Menggunakan Data:
Sebagian besar masyarakat jarang atau kadang-kadang menggunakan data yang dipublikasikan. Untuk itu, perlu ada upaya lebih dalam mendekatkan masyarakat dengan data dan menunjukkan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.
 - 16) Cara Meningkatkan Kualitas dan Pemanfaatan *Open Data*:
Pelatihan bagi operator, kebijakan yang lebih tegas, dan edukasi kepada masyarakat adalah kunci untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan *Open Data*. Dengan langkah-langkah ini, *Open Data* akan lebih bermanfaat dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh semua pihak.

IV. KESIMPULAN

Open data memiliki peran penting dalam mewujudkan *open governance* di Kabupaten Aceh Jaya. Meskipun implementasi *open data* telah mengalami kemajuan, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi agar pemanfaatannya dapat lebih optimal. Dengan menerapkan strategi peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kolaborasi, serta optimalisasi regulasi, diharapkan keterbukaan informasi

publik dapat semakin diperkuat dan berdampak positif bagi efektivitas pemerintahan daerah.

Penelitian ini memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan *open data* yang lebih efektif dan berkelanjutan. Studi lebih lanjut diperlukan untuk mengukur dampak jangka panjang dari implementasi *open data* terhadap kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

V. SARAN

Untuk mengoptimalkan penerapan *open data* di Kabupaten Aceh Jaya, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, Pemerintah Daerah harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan edukasi bagi aparatur sipil negara agar lebih profesional dan efisien dalam mengelola data. Kedua, penguatan infrastruktur teknologi menjadi hal yang krusial, dengan investasi pada sistem informasi yang lebih canggih untuk memastikan data dapat diakses dengan cepat, akurat, dan terintegrasi antarinstansi. Selain itu, peningkatan partisipasi publik juga harus diperhatikan melalui sosialisasi yang lebih masif mengenai manfaat *open data*, sehingga masyarakat dan berbagai pihak dapat memanfaatkannya secara optimal. Regulasi terkait *open data* juga perlu dioptimalkan dengan memperkuat dan memperjelas aturan yang memastikan setiap instansi memiliki pedoman yang jelas dalam pengelolaan dan penyebaran data. Terakhir, kolaborasi dengan pihak eksternal seperti akademisi, komunitas teknologi, dan sektor swasta dapat menjadi solusi inovatif dalam mengembangkan aplikasi berbasis data guna meningkatkan manfaat *open data* bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

VI. REFERENSI

- [1] Bhageshpur, Kiran. (2019). Data Is The New Oil -- And That's A Good Thing. Diakses di <https://www.forbes.com/sites/forbestechcolumnist/2019/11/15/data-is-the-new-oiland-thats-a-good-thing/?sh=2a20c4a73045> pada tanggal 20 Februari 2025
- [2] Gomes, Alvaro., Soares, Delfina. (2014). Open government data initiatives in Europe: Northern versus southern countries analysis. ACM International Conference Proceeding Series, Hal. 342-350.
- [3] Hendrawan, Arie. (2019). Open Government: Perkembangan dan Masa Depan. Diakses di <https://nasional.sindonews.com/read/1388938/18/open-government-perkembangan-dan-masa-depan-1553196647> pada Februari 2025
- [4] Dawes, S. S. (2010). Stewardship and usefulness: Policy principles for information-based transparency. Government Information Quarterly, 27(4), 377-383.
- [5] Janssen, M., Charalabidis, Y., & Zuiderwijk, A. (2012). Benefits, Adoption Barriers, and Myths of Open Data and Open Government. Information Systems Management, 29(4), 258-268.
- [6] Kassen, M. (2013). A promising phenomenon of open data: A case study of the Chicago open data project. Government Information Quarterly, 30(4), 508-513.
- [7] Open Knowledge Foundation (OKFN). (2012). Open Data Handbook Documentation, Release 1.0.0.
- [8] Rocha, Á. (2012). Three-dimensional model for the global quality of a website. International Journal of Business Information Systems, 10(4), 436-446.
- [9] Ubaldi, B. (2013). Open Government Data: Towards Empirical Analysis of Open Government Data Initiatives. OECD Working Papers on Public Governance, No. 22.
- [10] OECD (2017). Digital Government Strategies. McKinsey & Company (2018). Unlocking the potential of open data.
- [11] World Bank (2019). Open Data for Development. UNDP (2020). Open Government Partnership.
- [12] Harvard Kennedy School (2021). Open Data and Governance.
- [13] MIT Technology Review (2022). The Role of Open Data in Governance. Data Transparency Institute (2023). Best Practices in Open Data.
- [14] Aceh Regional Government (2023). Open Data Implementation Report. Indonesian Ministry of ICT (2024). National Open Data Strategy.